

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial Institusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fulthoni, dkk. 2009. *Memahami Diskriminasi Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liliweri, Alo. 2018. *Prasangka, Konflik & Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Liliweri, Alo. 2009. *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Morissan. 2019. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mufti, Muslim. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurudin, Muhammad. 2022. *Logical Fallacy Menguak Kesalahan-Kesalahan Berpikir yang Kerap Kita Jumpai Sehari-hari*. Depok: Keira Publishing.
- Parekh, Bikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Roikan, Aminah. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sidanius, Jim and Felicia Pratto. 1999. *Social Dominance An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sidharta, Arief. 2008. *Pengantar Logika*. Bandung: Refika Aditama.
- Sirajudin, dkk. 2016. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.

Suhelmi, Ahmad. 2001. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak.

Jurnal

Syafi'ie. 2011. Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Pusat Studi HAM UII, 14 September 2011, halaman kutipan

Yogi Zul Fadhli. 2014. Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia. LBH Yogyakarta, 30 Mei 2014, halaman kutipan

Hasse J. 2011. Diskriminasi Negara Terhadap Agama di Indonesia Studi Atas Persoalan Posisi Hukum Tawani Tolotang Pasca Pengakuan Agama Resmi. Universitas Gajah Mada. 17 Agustus 2011, halaman kutipan

Amin Mudzakkir. 2017. Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya. LIPI Jakarta. 8 Juni 2017, halaman kutipan

Suismanto. 2007. Perda Syariat Islam dan Problematikanya (Kasus Tasikmalaya). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1 Juni 2007, halaman kutipan

Subhi Azhari. Politik Negara Atas Agama: Akar Diskriminasi Terlembaga Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia. Yayasan Inklusif.

Laman

Komnas HAM Republik Indonesia. Komnas HAM: Diskriminasi Masih Terjadi di Indonesia. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/8/6/1513/komnas-ham-diskriminasi-masih-terjadi-di-indonesia.html>

Hidayatullah.com. Wali Kota Tasikmalaya Deklarasikan Penerapan Perda Syariah. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2015/04/23/68676/wali-kota-tasikmalaya-deklarasikan-penerapan-perda-syariah.html>

VOA. 2017. Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://www.voaindonesia.com/a/komnas>

[-perempuan-temukan-421-kebijakan diskriminatif/3940841.html#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16952875084924&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.voaindonesia.com%2Fa%2Fkomnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif%2F3940841.html](https://www.voaindonesia.com/Fa%2Fkomnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif%2F3940841.html#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16952875084924&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.voaindonesia.com%2Fa%2Fkomnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif%2F3940841.html)

Setara Institute for Democracy and Peace. 2018. Dampak Produk Hukum Daerah Diskriminatif Terhadap Pelayanan Publik. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://setara-institute.org/dampak-produk-hukum-daerah-diskriminatif-terhadap-akses-pelayanan-publik/>

BBC News Indonesia. 2012. Setara Prihatin Perda Syariah Tasikmalaya. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120606_tasiksyariah#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16955957507920&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Findonesia%2Fberita_indonesia%2F2012%2F06%2F120606_tasiksyariah

Dictio.id. 2017. Apa yang dimaksud dengan Teori Dominasi Sosial atau Social Dominance Theory. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-dominasi-sosial-atau-social-dominance-theory/4910>

ResearchGate. 2011. Social Dominance Theory. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari https://www.researchgate.net/publication/230427899_Social_Dominance_Theory

Komnas Perempuan. 2021. Siaran Pers Peluncuran Hasil Kajian Strategik Komnas Perempuan dan Lemhannas RI “Strategi Percepatan Penanganan Kebijakan Diskriminatif Atas Nama Otonomi Daerah Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-peluncuran-hasil-kajian-strategik-komnas-perempuan-dan-lemhannas-ri-strategi-percepatan-penanganan-kebijakan-diskriminatif-atas-nama-otonomi-daerah-guna-memperkokoh-ketahanan-nasional-2-desember-2021>

MKRI.id. 2022. Memahami Konsep Desentralisasi Asimetris Berdasarkan Undang-Undang. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18630&menu=2>

Peraturan.go.id. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

Diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://peraturan.go.id/id/perda-kota-tasikmalaya-no-7-tahun-2014>

Peraturan.bpk.go.id. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Diakses pada 4 Oktober 2023, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/221288/perda-kota-tasikmalaya-no-7-tahun-2014>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya

Skripsi

Mega Purnamasari, 2018. (Skripsi) Relasi Politik Pemerintah Dengan Jemaat Gereja Paroki Hati Kudus Yesus Dalam Dinamika Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.

Ilham Ramadhani, 2023. (Skripsi) Hak Politik Kelompok Minoritas (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Protestan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya.